

## IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

**Aldho Setya Darma**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

\* Email: [aldodumai19@gmail.com](mailto:aldodumai19@gmail.com)

### **Abstract :**

*The Family Hope Program is one of the programs that aims to provide assistance to the underprivileged, to reduce poverty, and improve the quality of existing human resources. This study aims to determine how the implementation of the Family Hope Program is in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The urgency of this research lies in the need to evaluate program implementation to ensure it is targeted and effective. This research is a qualitative research with data collection techniques in this research using several methods, namely literature studies, observations, and interviews. There are several problem factors that are related to the substance of the policy, the behavior of the implementer's duties, resources and participation of the target group. In the theory of policy implementation put forward by Muchlis Hamdi (2014) which consists of resources, participation of the target group, the behavior of the implementer's duties and the substance of the policy. The implementation of PKH is expected to improve the welfare of the community in terms of improving the standard of living of socio-economic, education, and health, especially in poor communities. The purpose of this study is to determine the Implementation of PKH and the Supporting and Inhibiting Factors of PKH Implementation. The implementation of this PKH program has not gone well because there are several indicators that cause the program not to run smoothly.*

### **Abstrak :**

*Program Keluarga Harapan adalah salah satu program yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu, untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi pelaksanaan program agar tepat sasaran dan efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara. Ada beberapa faktor permasalahan yang ada kaitannya dengan substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, sumber daya dan partisipasi kelompok sasaran. Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi (2014) yang terdiri dari sumber daya, partisipasi kelompok sasaran, perilaku tugas pelaksana dan substansi kebijakan. Pelaksanaan PKH diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, serta kesehatan terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PKH dan Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PKH. Implementasi program PKH ini belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa indikator yang menyebabkan program tidak berjalan dengan lancar.*

**Keyword:** Policy Implementation, Kubang Jaya Village, Family Hope Program, Siak Hulu, Kampar Regency

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang menjadi tantangan secara global dan yang paling mendalam di abad ke-21 ini. Fenomena kemiskinan berdampak serius pada kualitas hidup masyarakat di berbagai negara. Masalah kemiskinan sering kali melanda negara seperti negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki permasalahan kemiskinan yang serupa dengan negara

berkembang lainnya. Kemiskinan menyangkut banyak aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan finansial. Badan Pusat Statistik mempublikasi data tingkat kemiskinan nasional pada bulan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta jiwa, turun 0,46 juta jiwa terhadap September 2022. Angka tersebut masih cukup besar dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia meskipun terdapat penurunan masyarakat miskin pada September 2023.

Tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia menjadikan kemiskinan menjadi suatu masalah yang pelik. Oleh sebab itu, diperlukan peran pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meminimalisasi permasalahan kesejahteraan di Indonesia, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menciptakan berbagai program untuk menanggulangi masalah kemiskinan (Hariandja, 2024).

Program Keluarga Harapan (PKH) berfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan komponen peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktifitas dan pendidikan yang layak maka secara otomatis akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun perlu disadari bahwa tidak semua rakyat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak, lapisan masyarakat menengah kebawah bayak yang tidak bisa merasakan pelayanan kesehatan dan mengenyam pendidikan. Hal ini dikernakan mereka tidak memiliki biaya untuk mengakses kesehatan dan pendidikan. Maka dari itu Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan peluang yang lebih baik dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak (Sari, 2021).

Program Keluarga Harapan adalah program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan yang lainnya. PKH bertujuan mengurangi beban RTSM dan di harapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. Penerima PKH mendapatkan bantuan tunai yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, atau obat-obatan. Meningkatnya akses terhadap pendidikan anak-anak dari keluarga PKH diwajibkan untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan ibu hamil dan anak balita dari keluarga PKH diwajibkan untuk

memeriksa kesehatan secara rutin dipuskesmas (Ayu, 2020).

Meningkatnya kualitas gizi di desa Kubang Jaya memiliki pendapatan yang lebih stabil dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga dengan baik. Meskipun PKH telah memberikan dampak positif, masih ada terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi di Desa Kubang Jaya, adanya kurang akses terhadap informasi yang di Desa Kubang Jaya masih belum memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang program PKH. Adanya keterbatasan sumber daya manusia: pendamping PKH yang ada di Desa Kubang Jaya masih terbatas dan adanya juga kurang koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan program PKH di Desa Kubang Jaya akan dapat menyebabkan inefisiensi dan tumpang tindih program yang ada (Kholif, 2019).

Kebijakan Publik Proses kebijakan publik menurut Subarsono (2005: 8) adalah Serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi Kebijakan dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Faktor Pendukung Implementasi menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Winarno (2002), yakni komunikasi, Sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambat implementasi menurut Sunggono (1994) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, pembagian potensi.

Kebijakan kemiskinan adalah suatu usaha pengambilan keputusan dalam hal kemiskinan mulai dari menentukan target dengan menggunakan indikator, penanganan, dan penanggulangan untuk mengatasi

masalah kemiskinan. Dalam menangani dan menanggulangi kemiskinan harus mengerti betul tentang kemiskinan dan indikator yang akan digunakan. Kajian tentang pemahaman kemiskinan yang hakiki dan komprehensif sangat diperlukan untuk memahami dan mencari penjelasan agar tidak terjadi salah urus ketika menanggulangnya.

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Kewajiban penerima PKH, berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan. Persyaratan seperti mengontrol kandungan ibu hamil, menimbang dan memberi vitamin kepada balita. Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah RTSM yang memiliki ibu hamil, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.

Berkaitan dengan pendidikan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan pada satuan pendidikan setara SD dan SMP dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

Dalam perkembangan terkini, penanggulangan kemiskinan telah mengalami transformasi yang signifikan dengan memanfaatkan pendekatan berbasis data dan integrasi teknologi

informasi dalam sistem perlindungan sosial, termasuk di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) telah mengalami berbagai inovasi, mulai dari digitalisasi sistem pendataan hingga evaluasi kinerja berbasis indikator kesejahteraan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa PKH berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penurunan tingkat kemiskinan jangka pendek. Namun demikian, state of the art saat ini menunjukkan bahwa efektivitas jangka panjang program seperti PKH masih diperdebatkan, khususnya dalam hal keberlanjutan dampaknya terhadap pemutusan mata rantai kemiskinan antar generasi. GAP yang muncul adalah minimnya kajian yang fokus secara spesifik pada dinamika pelaksanaan PKH di tingkat desa seperti Desa Kubang Jaya, termasuk faktor-faktor penghambat seperti akses informasi, keterbatasan SDM pendamping, dan lemahnya koordinasi lintas instansi. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi PKH di tingkat mikro berjalan secara efektif, serta mengidentifikasi kendala-kendala struktural dan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas program.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif dimana hal tersebut berupa pengamatan terhadap kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan perilaku orang-orang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara. Pada teknik observasi peneliti mengamati implementasi PKH di Desa Kubang Jaya. Dalam teknik wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan ke pada informan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. dalam teknik dokumentasi dilakukan melalui gambar

dan dokumen penunjang penelitian. Metode penelitian deskriptif ialah pencarian fakta interpretasi yang sesuai.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, sudut pandang, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran yang nyata tentang bagaimana keadaan dilapangan sesungguhnya. Dalam metode deskriptif juga tidak membatasi pengumpulan data, analisis maupun interpretasi dari data tersebut. Kemahiran peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara juga sangat dituntut dalam menentukan data yang akan diperolehnya. Informasi yang akan diperoleh berkaitan dengan inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial pada program Bantuan keluarga harapan (PKH) di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Data yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kubang Jaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Keluarga Harapan adalah program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang kesehatan dan pendidikan (Arlina, 2021).

Program Keluarga Harapan di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. PKH bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs). Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan yaitu anak usia sekolah, maupun kehadiran difasilitas kesehatan yaitu anak balita dan ibu hamil (Aulya Wardani, 2023).

### **Penurunan Angka Kemiskinan di Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar**

Desa Kubang Jaya, di Kabupaten Kampar, Riau, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di desa tersebut mengalami penurunan dari 11,28% pada tahun 2021 menjadi 8,72% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan sebesar 2,56% dalam satu tahun. Hasil wawancara dengan Pendamping PKH tersebut menunjukkan adanya perubahan yang dialami oleh keluarga penerima manfaat PKH. Hal ini dirasakan pada perbedaan kondisi keluarga sebelum pemerintah meluncurkan program PKH dan sesudah program ini terealisasikan di dalam masyarakat. Para Informan sangat berterimakasih kepada pemerintah telah turut memperhatikan keluarga miskin dan mensejahterakan keluarga mereka, dan merubah kondisi ekonomi keluarga ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Berbicara tentang perubahan sosial yang dialami oleh keluarga penerima bantuan tunai Program Keluarga Harapan, perubahan sosial yang dialami dilihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu melihat waktu yang berbeda dengan istilah kata dulu,

sekarang, dan masa akan datang atau masa depan (Mochsin, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Muchlis Hamdi (2014) untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. menurut Muchlis Hamdi (2014) dipengaruhi oleh 4 faktor yang perlu untuk diperhatikan.

### **Substansi Kebijakan**

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Muchlis Hamdi adalah substansi kebijakan. Faktor ini digunakan untuk menganalisis spesifikasi isi kebijakan dan keselarasan isi suatu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Dengan berlandaskan pada faktor ini, penulis akan menganalisis spesifikasi isi dan keselarasan antara isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sebagai peraturan teknis pelaksanaan PKH di Kabupaten Kampar, termasuk di Desa Kubang Jaya (Hidayati, 2024).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah dapat dikatakan spesifik dalam menjelaskan teknis pelaksanaannya. Peraturan tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan sistem pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dan orang tua, menjadi panduan bagi penyelenggara atau pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang membutuhkan, serta menjadi pedoman bagi masyarakat yang menjadi sasaran PKH agar dapat memenuhi kewajibannya demi optimalnya pelaksanaan PKH.

### **Perilaku Tugas Pelaksana**

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Muchlis Hamdi adalah faktor perilaku tugas pelaksana. Faktor ini digunakan untuk mengamati dan menganalisis sejauh mana motivasi

kerja yang dimiliki oleh pelaksana, kecenderungan penyalahgunaan wewenang, dan kemampuan pembelajaran. Hal ini melibatkan peningkatan motivasi dan kemampuan melalui kegiatan peningkatan SDM PKH tingkat Kabupaten dan rapat koordinasi SDM PKH. Selain itu, para pelaksana cukup termotivasi untuk bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal kecenderungan penyalahgunaan wewenang, terdapat tata tertib, tugas pokok dan fungsi yang terdapat dalam SK para pendamping dimana hal tersebut mencegah kecenderungan penyalahgunaan wewenang dari para pelaksana PKH (Putri, 2022).

### **Sumber daya**

Faktor terakhir yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program menurut Muchlis Hamdi adalah faktor sumber daya. Menurut Edward III (1980), sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi program. Sumber daya tersebut meliputi staf yang memadai serta berkapabilitas untuk melaksanakan tugas-tugas, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Anggaran pelaksanaan PKH dinilai belum cukup untuk kebutuhan operasional para pendamping. Anggaran tersebut memang bukan tanpa alasan dikatakan belum mencukupi kebutuhan operasional para pendamping dalam melaksanakan tugasnya (Daicy, 2019).

Hal kedua yang termasuk dalam faktor sumber daya adalah ketersediaan pelaksana. Selain anggaran, ketersediaan sumber daya manusia merupakan hal yang tak kalah penting untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Pendamping PKH menjadi ujung tombak untuk mendukung keberhasilan Program Keluarga Harapan sehingga para pendamping ini merupakan pendamping yang memiliki kualitas yang cukup baik dari segi ilmu pengetahuan, komunikasi, dan serta

harus memiliki kuantitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam implementasi program ini (Nur Aeda, 2022).

Hal ketiga yang tergabung dalam faktor sumber daya adalah kecukupan peralatan. Kecukupan peralatan maksudnya disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan PKH. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa modul pembelajaran, alat peraga, gedung pertemuan, dan lain-lain yang dapat mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Rahardjo, 2020).

### **Partisipasi kelompok sasaran**

Partisipasi masyarakat berlandaskan pada penciptaan peluang yang memberikan ruang bagi anggota masyarakat sasaran untuk secara aktif terlibat dan untuk menarik manfaat dari kegiatan yang diikuti. Faktor partisipasi kelompok sasaran dipakai untuk mengamati dan menganalisis bagaimana penerimaan manfaat kegiatan dan keterlibatan kelompok sasaran, dimana dalam program ini kelompok sasarannya adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya ada faktor dari partisipasi kelompok sasaran, Hal positif didapat dari penerimaan masyarakat terhadap program ini, dimana para (KPM) menyambut baik adanya program ini karena dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka. Adapun kendala dari keluarga penerima manfaat ini ialah kurangnya kesadaran dari orang tua untuk pendidikan anak, kurangnya kemauan untuk memeriksa kesehatan anak dan ibu hamil, adanya keseringan absen pada pertemuan pada peningkatan kemampuan keluarga (Hariandja, 2024).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari penelitian tersebut yang mengenai tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan ini

belum dapat berjalan dengan baik, karena ada beberapa faktor yang berdampak belum dapat keberhasilan implementasi program belum terpenuhi dengan baik sesuai kebutuhan dari implementasi program tersebut. Dalam substansi kebijakan ada Permensos Nomor 1 Tahun 2018 ada petunjuk teknisnya sudah yang diberikan oleh pemerintah dan ketentuan kepada pelaksanaan PKH. Sumber Daya di Desa Kubang Jaya dapat dianalisis bahwasanya sumber daya dalam pelaksanaan program PKH ini belum semuanya tercukupi. Karena anggaran operasional dan kuantitas pendamping pada program PKH ini masih menjadi kendala dalam kecukupan sumber daya yang ada.

### **REKOMENDASI RISET**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kubang Jaya, berikut tiga rekomendasi atau saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas program:

*Pertama*, Peningkatan Kapasitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendamping PKH Pemerintah daerah maupun pusat perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menambah jumlah pendamping PKH serta memberikan pelatihan rutin guna meningkatkan kompetensi mereka. Hal ini penting agar pendamping dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan menjangkau seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan lebih efektif.

*Kedua*, Penguatan Sistem Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat Salah satu kendala utama dalam implementasi PKH di Desa Kubang Jaya adalah keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penyebaran informasi melalui media lokal, forum desa, atau pendekatan berbasis teknologi digital agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai penerima manfaat secara lebih menyeluruh.

*Ketiga*, Koordinasi Antarinstansi yang Lebih Efisien dan Terintegrasi

Diperlukan perbaikan dalam koordinasi antara Dinas Sosial, aparat desa, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik agar tidak terjadi tumpang tindih program atau kesalahan teknis dalam pelaksanaan. Pembentukan forum koordinasi lintas sektor di tingkat desa/kecamatan secara berkala dapat menjadi solusi untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi pelaksanaan PKH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeda, N., & Jannah, R. (2022). Implementasi dan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat: Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 165–186. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.98>
- Arlina, G., Muhammad, N., & Umar. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 9(2), 70–80. <http://eprints2.ipdn.ac.id/611/1/31655-76278-3-PB.pdf>
- Aulya Wardani, W., Ismail, M., Kurniawansyah, E., & Sawaludin, S. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2189–2196. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1706>
- Ayu, K., Sutomo, & Azhari, K. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 1–16. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEK>
- Hariandja, I. G. A., & Muhafidin, D. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 29–41. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16203>
- Hidayati, M., Cikusin, Y., & Sekarsasi, R. W. (2024). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Respon Publik*, 18(1), 1–10.
- Kholif, Khodziah Isnaini, Irwan Noor, dan Siswidiyanto. 2019. "Implementasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2(4): 709–14.
- Mandolang, Y., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Mochsin, S. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sepauk. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(2), 7932–7937. <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.642>
- Putri, N. A., & Purnaweni, H. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bojonegoro. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 510–522.
- Rahardjo, B., Ediyono, S., & Putri, D. K. (2020). Implementasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui Family Development Session (FDS) pada Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala*, 2(2), 72. <https://doi.org/10.32585/jikemb.v2i2.1094>

Sari, P., & Arifin, J. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan dilihat dari aspek komunikasi di Desa Mahe Seberang Kecamatan Haruai. *JAPB*, 4(1), 426-440. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/417>